

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL DAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN DANA
PERIMBANGAN DAN BELANJA RUTIN SEBAGAI VARIABEL
KONTROL**

(Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Tahun 2018-
2022)

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana S-1



Disusun Oleh :

Amalya Safira Salsabila

NIM : 31402000026

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEMARANG

2023

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL DAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN DANA
PERIMBANGAN DAN BELANJA RUTIN SEBAGAI VARIABEL
KONTROL**

(Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Tahun 2018-
2022)

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana S-1



Disusun Oleh :

Amalya Safira Salsabila

NIM : 31402000026

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEMARANG

2023

Halaman Pengesahan Skripsi

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL DAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

(Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota se- Jawa Tengah Tahun 2018-
2022)

Disusun Oleh:

Amalya Safira Salsabila

NIM : 31402000026

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan dihadapan
sidang panitia ujian skripsi Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung

UNISSULA

جامعته سلطان أجونغ الإسلامية

Semarang, 30 November 2023

Menyetujui :

Pembimbing



Dr. H. Kiryanto, S.E., M.Si., Akt., CA.
NIK. 211489001

Halaman Pengesahan Skripsi

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH DENGAN DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA RUTIN SEBAGAI
VARIABEL KONTROL**

(Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota se- Jawa Tengah Tahun 2018-2022)

Disusun Oleh:

Amalya Safira Salsabila

NIM : 31402000026

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal 22 Desember 2023

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing



Dr. H. Kiryanto, S.E., M.Si., Akt., CA.
NIK. 211489001

Penguji II



Dr. Sri Anik, S.E., M.Si.
NIK. 210493033

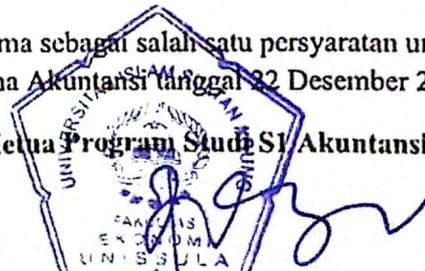
Penguji I



Sri Dewi Wahyundaru, S.E., M.Si., Ak., CA., ASEAN CPA., CRP.
NIK. 211492003

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi tanggal 22 Desember 2023

Ketua Program Studi S1 Akuntansi



Provita Wijayanti, S.E., M.Si.
NIK.211403012

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Amalya Safira Salsabila

NIM : 31402000026

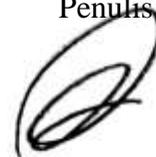
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/S1 Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Dana Perimbangan dan Belanja Rutin Sebagai Variabel Kontrol”** (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Tahun 2018-2022) merupakan hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang tidak sesuai dengan etika keilmuan serta belum pernah diajukan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Sultan Agung.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan Tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 20 Februari 2024

Penulis



Amalya Safira Salsabila

HALAMAN PENGESAHAN TURNITIN SKRIPSI

Nama : Amalya Safira Salsabila

NIM : 31402000026

Program Studi : S1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Judul Artikel : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Sistem
Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Dengan Dana Perimbangan dan Belanja Rutin Sebagai Variabel Kontrol

Semarang, 20 Februari 2024

Mengetahui



Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Provita Wijayanti, SE M.Si.
NIK. 211403012

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the supervisor, Dr. H. Kiryanto.

Dr. H. Kiryanto, S.E., M.Si., Akt. CA.

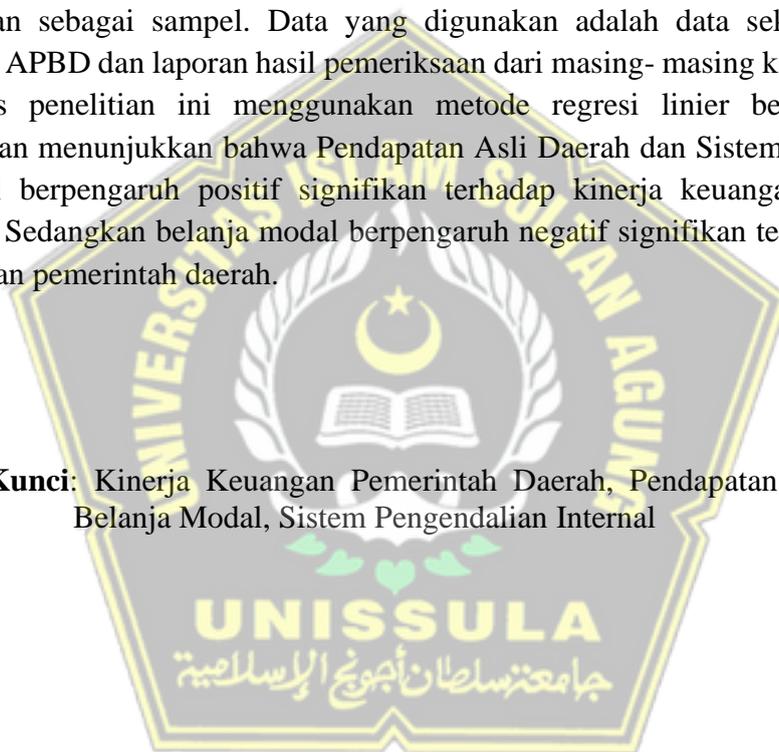
NIK.211489001

UNISSULA
جامعة سلطان أبو جوح الإسلامية

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, belanja modal, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Variabel terikat diukur menggunakan rasio efektivitas. Variabel bebas terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dihitung menggunakan total Pendapatan Asli Daerah, belanja modal dihitung menggunakan total belanja modal, dan Sistem Pengendalian Internal dengan menggunakan jumlah temuan SPI. Populasi dalam penelitian ini adalah 29 kabupaten dan 5 kota se-provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022. Pengambilan sampel menggunakan sensus sampling, yaitu seluruh populasi dijadikan sebagai sampel. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan APBD dan laporan hasil pemeriksaan dari masing-masing kabupaten/kota. Analisis penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

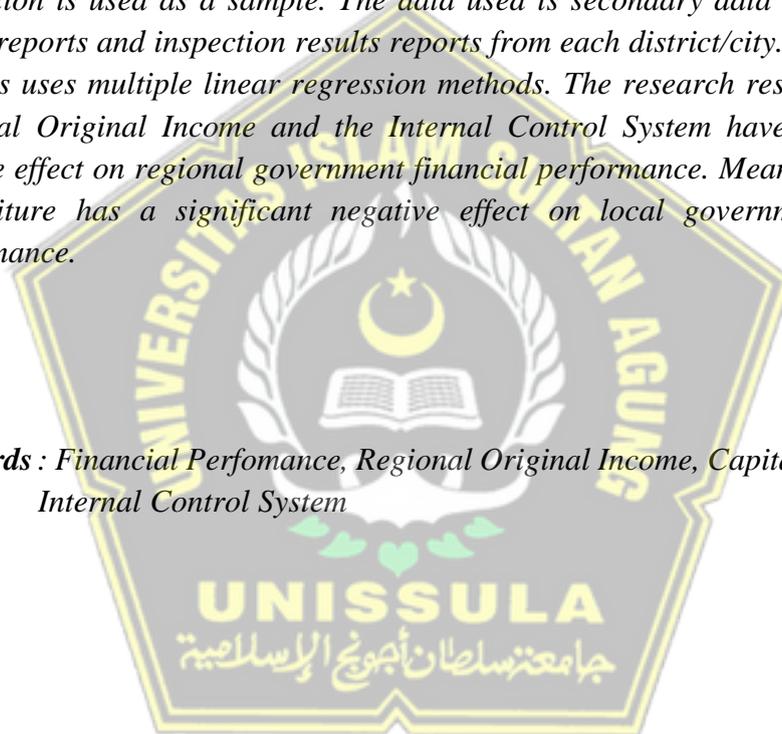
Kata Kunci: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Sistem Pengendalian Internal



ABSTRACT

This study aims to determine the influence of Regional Original Income, capital expenditure, and Internal Control Systems on regional government financial performance. The dependent variable is measured using the effectiveness ratio. The independent variables consist of Original Regional Income which is calculated using total Regional Original Income, capital expenditure which is calculated using total capital expenditure, and the Internal Control System using the number of SPI findings. The population in this study was 29 districts and 5 cities in Central Java province in 2018-2022. Sampling uses census sampling, that is, the entire population is used as a sample. The data used is secondary data in the form of APBD reports and inspection results reports from each district/city. This research analysis uses multiple linear regression methods. The research results show that Regional Original Income and the Internal Control System have a significant positive effect on regional government financial performance. Meanwhile, capital expenditure has a significant negative effect on local government financial performance.

Keywords : *Financial Performance, Regional Original Income, Capital Expenditures, Internal Control System*



INTISARI

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh efektivitas kinerja keuangan kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah yang mengalami fluktuasi dan cenderung menurun sejak tahun 2018 hingga 2022. Kinerja keuangan pemerintah daerah didefinisikan sebagai ukuran kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diukur dalam satuan uang dengan semua kekayaan milik daerah. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio efektivitas. Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, belanja modal, Sistem Pengendalian Internal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data berupa dokumentasi atau pengarsipan. Teknik sampling yang digunakan adalah sensus sampling yakni menggunakan seluruh populasi sebagai sampel penelitian. Analisis yang digunakan adalah uji regresi linier berganda, uji t, uji f, uji koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, 2) Belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, 3) Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Untuk itu disarankan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah untuk memberikan perhatian lebih pada pengalokasian belanja modal untuk pengadaan infrastruktur guna meningkatkan produktivitas daerah yang berdampak pada peningkatan efektivitas kinerja keuangan pemerintah.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Sistem Pengendalian Internal

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA RUTIN SEBAGAI VARIABEL KONTROL”** (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota se- Jawa Tengah Tahun 2018- 2022) sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana S1 Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan, dukungan, arahan dan fasilitas dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Heru Sulistyono, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Provita Wijayanti S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. H. Kiryanto., S.E., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan pra skripsi ini hingga selesai.
4. Bapak Dr. Chrisna Suhendi, MBA., S.E., Ak., CA selaku dosen wali yang telah memberikan motivasi kepada penulis dan menyelesaikan penyusunan pra skripsi
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama belajar.
6. Seluruh staff, karyawan TU, petugas administrasi dan seluruh pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang tidak dapat

disebutkan satu persatu yang senantiasa membantu penulis selama proses perkuliahan di Fakultas Ekonomi,

7. Kedua orang tua penulis Bapak Mukhamad Syakur dan Ibu Endang Susilowati yang selalu memberikan motivasi, dukungan, limpahan cinta dan kasih sayang serta panjatan doa yang tidak terputus untuk keberhasilan penulis.
8. Adik- adik tercinta, Alya Safira Humaira dan Aqila Zivana Latisha yang telah memberikan dukungan penulis dengan sepenuh hati, selalu mendoakan, memberikan restu untuk terus melangkah.
9. Terimakasih kepada sahabat- sahabat tercinta Amalia Oktaviana, Alitsa Qothrun Nadzifa, Tiana Kerto Arti dan Chintya Cahyaningrum yang selalu berupaya memberikan semangat, dukungan, motivasi serta saran yang diberikan.
10. Teman- teman kuliah dan bimbingan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih banyak telah membantu penyusunan pra skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Diharapkan skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan bagi semua pihak yang membutuhkan. Semoga Allah SWT, melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya serta membalas segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 30 November 2023

Penulis



Amalya Safira Salsabila

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
INTISARI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
2.1 Grand Theory	14
2.1.1 Teori Stewardship	14
2.2 Variabel Penelitian	16

2.2.1	Pendapatan Asli Daerah	16
2.2.2	Belanja Modal	17
2.2.3	Sistem Pengendalian Internal	19
2.2.4	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	21
2.2.5	Dana Perimbangan.....	24
2.2.6	Belanja Rutin	26
2.3	Tinjauan Penelitian Terdahulu	28
2.4	Kerangka Penelitian Teoritis dan Pengembangan Hipotesis.....	33
2.4.1	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	33
2.4.2	Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	33
2.4.3	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	35
2.5	Kerangka Penelitian	36
BAB III	METODE PENELITIAN.....	38
3.1	Jenis Penelitian.....	38
3.2	Populasi dan Sampel.....	38
3.3	Jenis dan Sumber Data	39
3.4	Metode Pengumpulan Data	39
3.5	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	40

3.5.1	Definisi Operasional Variabel.....	40
3.5.2	Pengukuran Variabel.....	43
3.6	Teknik Analisis Data.....	44
3.6.1	Analisis Deskriptif.....	45
3.6.2	Uji Asumsi Klasik.....	45
3.6.3	Model Regresi Linier Berganda.....	47
3.6.4	Uji Kelayakan Model.....	48
3.6.5	Pengujian Hipotesis Statistik (Uji t).....	49
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	51
4.1	Hasil Penelitian.....	51
4.1.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	51
4.2	Analisis Data.....	52
4.2.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	52
4.3	Uji Asumsi Klasik.....	56
4.3.1	Uji Normalitas.....	56
4.3.2	Uji Autokorelasi.....	57
4.3.3	Uji Multikolinearitas.....	58
4.3.4	Uji Heteroskedastisitas.....	59
4.4	Analisis Regresi Linier Berganda.....	60
4.5	Uji Kelayakan Model.....	63

4.5.1	Uji Statistik F (Signifikan Simultan).....	63
4.6	Pengujian Hipotesis.....	65
4.6.1	Uji Statistik (Uji t).....	66
4.7	Pembahasan	67
4.7.1	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	67
4.7.2	Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	69
4.7.3	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	71
BAB V	PENUTUP.....	73
5.1	Kesimpulan.....	73
5.2	Keterbatasan	74
5.3	Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan.....	2
Tabel 1.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 (dalam rupiah)	3
Tabel 1.3 Matriks Arah Penelitian	9
Tabel 2. 1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	43
Tabel 4. 1 Kabupaten/Kota se- Provinsi Jawa Tengah.....	51
Tabel 4. 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	53
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas	56
Tabel 4. 4 Hasil Uji Autokorelasi	58
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas.....	59
Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas	60
Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi Linier Berganda sebelum Variabel Kontrol	61
Tabel 4.8 Hasil Uji Regresi Linier Berganda sesudah Variabel Kontrol	61
Tabel 4. 9 Hasil Uji F.....	63
Tabel 4. 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi sebelum Variabel Kontrol.....	64
Tabel 4. 11 Hasil Uji Koefisien Determinasi setelah Variabel Kontrol.....	65
Tabel 4.12 Hasil Uji t	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian 37



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Sampel Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah.....	81
Lampiran 2 Tabulasi Data Penelitian	86
Lampiran 3 Output Analisis Deskriptif.....	86
Lampiran 4 Output Uji Normalitas	87
Lampiran 5 Output Uji Autokorelasi	87
Lampiran 6 Output Uji Multikolinearitas	88
Lampiran 7 Output Uji Heteroskedastisitas	88
Lampiran 8 Output Uji Regresi Linear Berganda dan Uji t sebelum Variabel Kontrol	89
Lampiran 9 Output Uji Regresi Linear Berganda dan Uji t sesudah Variabel Kontrol	89
Lampiran 10 Output Uji F.....	90
Lampiran 11 Output Uji Koefisien Determinasi Sebelum Variabel Kontrol.....	90
Lampiran 12 Output Uji Koefisien Determinasi Setelah Variabel Kontrol.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang melaksanakan otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah di atur dalam UU No. 23 Tahun 2014. Berdasarkan kebijakan UU No. 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahannya, maka pemerintah pusat tidak melaksanakan pengawasan tiap daerah secara menyeluruh. Pemberian kewenangan tersebut juga termasuk wewenang untuk dapat mengelola keuangan daerahnya secara mandiri yang dipergunakan untuk pembangunan daerah. Pengelolaan potensi daerah berdampak pada kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik dan optimal dapat menjamin peningkatan pembangunan daerah sehingga kinerja pemerintah daerah dikatakan berhasil (Sari & Mustanda, 2019).

Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan cerminan dari kinerja pemerintah yang menjadi tolok ukur proses pembangunan daerah. Pengukuran kinerja dengan indikator keuangan merupakan hal yang penting dalam organisasi sektor publik. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja periode- periode sebelumnya. Menurut (Putri Mulyaningsih et al., 2022) dalam pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah ada lima rasio yang digunakan yakni rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio

efisiensi, rasio pertumbuhan, dan rasio aktivitas. Dalam penelitian ini menggunakan rasio efektivitas untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Menurut (Saragih dan Siregar, 2020) kriteria efektivitas pengelolaan keuangan daerah diklasifikasikan berdasarkan prosentase, maka berikut merupakan tabel kriteria efektivitas pengelolaan keuangan daerah:

Tabel 1. 1

Kriteria Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Kriteria Efektivitas	Prosentase Efektivitas
Efektif	>100%
Efektivitas berimbang	= 100%
Tidak Efektif	< 100%

Sumber: Saragih dan Siregar, 2020

Kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota se- Provinsi Jawa Tengah yang diukur menggunakan rasio efektivitas mengalami fluktuasi yang tidak stabil sejak tahun 2018-2022. Menurut (Oktarina, 2019) penyebab kurang optimalnya pemerintah dalam merealisasikan pendapatan adalah karena lemahnya perencanaan yang sering kali memakan waktu yang berdampak pada keterlambatan pengesahannya, perencanaan anggaran yang kurang tepat, serta pelaksanaan anggaran pendapatan yang tidak dipahami dengan baik. Efektivitas diperoleh dari total realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi dengan total anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 (dalam rupiah)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Kinerja Keuangan
2018	13.396.772.661.000	13.711.836.037.849	102,35%
2019	14.488.333.544.000	14.422.760.303.000	99,55%
2020	15.993.530.006.000	14.390.382.112.000	89,98%
2021	15.017.805.787.000	14.503.239.195.000	96,57%
2022	16.366.550.006.000	16.263.750.853.852	99,37%

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja keuangan mengalami fluktuasi. Puncak kinerja keuangan tertinggi terjadi di tahun 2018 yang mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu menyerap secara maksimal dari dana yang ditargetkan, hal tersebut menandakan bahwa pemerintah daerah mampu mengoptimalkan dana yang dianggarkan untuk pembangunan daerahnya. Selanjutnya, pada tahun 2019 kinerja keuangan pemerintah menurun hingga 2,8%. Pada tahun 2020 penurunan kinerja keuangan pemerintah jatuh hingga 9,57% dari tahun 2019. Hal tersebut dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang mengharuskan pemerintah mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kebijakan Masyarakat (PPKM) yang mengakibatkan seluruh aspek kehidupan mengalami perubahan yang cukup drastis termasuk pada penurunan pertumbuhan ekonomi. Penurunan pertumbuhan ekonomi berdampak pada penurunan pendapatan negara yang umumnya berasal dari aktivitas perekonomian masyarakat (Bilqis dan Priyono, 2023). Dikutip dari *bappeda.jatengprov.go.id* gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan bahwa akibat adanya pandemic covid-19 penurunan realisasi PAD Jawa Tengah menukik tajam hingga 1,9 triliun sehingga

pembangunan daerah mengalami kemacetan. Akibat dari adanya pandemi tersebut, pengelolaan keuangan pemerintah tidak dapat berjalan dengan optimal. Dampak fenomena yang terjadi pada tahun 2020, kemudian pada tahun 2021 pemerintah menurunkan target dana dari tahun sebelumnya. Meski demikian pemerintah daerah lebih mampu merealisasikan anggarannya yang diikuti dengan kenaikan prosentase kinerja keuangannya hal tersebut dikarenakan refleksi dari peningkatan perekonomian Jawa Tengah di tengah pandemi. Sementara itu di tahun 2022 kinerja keuangan mulai berangsur pulih yang ditandai dengan kenaikan kinerja keuangan sebesar 2,8%, namun jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa kinerja keuangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 berada pada posisi ke-4. Kinerja keuangan tertinggi diraih oleh Jawa Timur sebesar 123,30%, lalu diikuti oleh Jawa Barat sebesar 108,85%, Banten 105,25%, Yogyakarta 99,28% serta kinerja keuangan terendah adalah Provinsi DKI Jakarta yaitu hanya sebesar 81,99% (*djpk.kemenkeu.go.id*).

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan efektif apabila realisasi lebih besar daripada dana yang dianggarkan (Sari dan Mustanda, 2019). Keberhasilan pemerintah dalam mengelola keuangan tercermin dari seberapa mampu pemerintah dalam merealisasikan target anggaran setiap tahunnya. Jika realisasi dilakukan secara optimal dengan berdasarkan pada sasaran yang telah ditetapkan pada saat perencanaan, maka dapat menunjang pembangunan daerah yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. Dengan pengelolaan keuangan yang tepat sasaran, efektif, efisien, akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah berdampak pada timbulnya

kepercayaan publik. Berdasarkan fenomena yang ada, peneliti menduga terdapat faktor- faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Faktor yang pertama yaitu adanya pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari potensi- potensi daerah sebagai wujud dari desentralisasi daerah (Desi Istiza, 2021). Kemandirian suatu daerah dapat terlihat dari kemampuan suatu daerah dalam menaikkan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan dampak yang besar untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah maka semakin kecil pula ketergantungan daerah terhadap pendanaan dari pusat.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Lathifa, 2019) menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diukur menggunakan total PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah yang diukur menggunakan rasio pertumbuhan. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Sari & Mustanda, 2019) yang menunjukkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diukur menggunakan total PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah yang diukur menggunakan rasio kemandirian, serta penelitian oleh (Fernandes & Putri, 2022) yang menunjukkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diukur menggunakan total PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah yang diukur menggunakan rasio efektivitas.

Hasil tersebut justru berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Niswani et al., 2022) yang menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diukur menggunakan total PAD berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah yang diukur menggunakan rasio efisiensi. Akan tetapi hasil penelitian yang telah dilakukan (Lestari dan Hapsari, 2020) menunjukkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diukur menggunakan total realisasi PAD berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah yang diukur menggunakan rasio efektivitas serta penelitian oleh (Fauziyah, 2022) yang menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diukur menggunakan rasio pertumbuhan PAD berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah yang diukur menggunakan rasio efektivitas.

Faktor selanjutnya yakni belanja modal. Belanja modal sendiri merupakan realisasi anggaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya dalam satu periode akuntansi. Produktifitas penggunaan anggaran tercermin dari pengalokasian belanja modal (Digidowiseiso et al., 2022). Semakin maksimal penggunaan belanja modal maka semakin bertambahnya aset tetap dan sarana parasarana suatu daerah, sehingga hal tersebut dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan.

Penelitian yang telah dilakukan oleh (Lathifa dan Haryanto, 2019) menyimpulkan bahwa belanja modal yang diukur menggunakan total belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah yang diukur menggunakan rasio pertumbuhan. Begitu pula dengan penelitian yang

dilakukan (Sari dan Mustanda, 2019) yang menunjukkan hasil bahwa belanja modal yang diukur menggunakan total belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah yang diukur menggunakan rasio pertumbuhan serta penelitian oleh (Fauziyah, 2022) menunjukkan hasil bahwa belanja modal yang diukur menggunakan rasio pertumbuhan belanja modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah yang diukur menggunakan rasio efektivitas.

Namun penelitian yang dilakukan oleh (Lestari dan Hapsari, 2020) menyimpulkan hasil bahwa belanja modal yang diukur menggunakan total realisasi belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah yang diukur menggunakan rasio efektivitas. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Maulina et al., 2021) menyimpulkan hasil bahwa belanja modal yang diukur menggunakan total realisasi belanja modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah yang diukur menggunakan derajat desentralisasi.

Faktor selanjutnya adalah Sistem Pengendalian Internal (SPI). Pengendalian internal merupakan faktor penting dalam pengelolaan keuangan yang bersifat riskan. Pemerintah daerah memerlukan sistem yang dapat mengamankan sumber daya pemerintah. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menyatakan bahwa sistem pengendalian pemerintah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seluruh penyelenggara pemerintahan dengan terus menerus secara efektif, efisien, kenadalan dalam pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan taat kepada peraturan

perundang-undangan untuk menciptakan kepercayaan. Apabila sistem pengendalian internal lemah atau bahkan tidak ada maka hal tersebut dapat berimbas pada terbengkalainya sumber daya pemerintah yang dapat menimbulkan kerugian (Tjandrakirana et al., 2019). Hal tersebut dapat mempengaruhi hilangnya kepercayaan publik, karena pemerintah dianggap gagal dalam mengelola keuangan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Seniorita et al., 2022) menyimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang diukur menggunakan indikator tingkat input penggunaan anggaran, proses yaitu pelaksanaan anggaran, serta output yaitu pencapaian prestasi pemanfaatan anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Serta penelitian yang dilakukan oleh (Karim & Mursalim, 2019) yang menggunakan data primer menunjukkan hasil bahwa Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang diukur menggunakan indikator lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi, komunikasi dan pemantauan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan

Namun hasil tersebut justru berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pradana et al., 2022) dan (Tjandrakirana et al., 2019) menunjukkan hasil bahwa Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang diukur dengan jumlah temuan kelemahan SPI berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah yang diukur dengan menggunakan rasio efektivitas.

Dana perimbangan dan belanja rutin digunakan sebagai variabel kontrol untuk mengurangi pengaruh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 dana perimbangan didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer oleh pemerintah pusat ke daerah- daerah sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Pengukuran dana perimbangan menggunakan total realisasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Belanja rutin didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBD yang dikeluarkan guna mendanai kegiatan rutin instansi dalam jangka waktu tertentu (Lathifa, 2019). Pengukuran menggunakan total realisasi belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, serta belanja bantuan keuangan. Penelitian sebelumnya yang menggunakan dana perimbangan dan belanja rutin sebagai variabel kontrol pada pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh (Lathifa, 2019) yang menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja modal secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Tabel 1.3 Matriks Arah Penelitian

No	Peneliti	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Belanja Modal	Sistem Pengendalian Internal
1.	Hasna Lathifa dan Haryanto (2019)	+ dan signifikan	+ dan signifikan	
2.	Ni Made Diah Permata Sari, I Ketut	+ dan signifikan	+ dan signifikan	

	Mustanda (2019)			
3.	Joni Fernandes dan Silviani Putri (2022)	+ dan signifikan		
5.	Novita Niswani (2022)	- dan tidak signifikan		
6.	Endri Lestari, Dini Wahjoe Hapsari (2020)	+ dan tidak signifikan	- dan signifikan	
7.	Indrani Nuzul Fauziah, Diah Ekaningtias (2022)	+ dan tidak signifikan	+ dan tidak signifikan	
8.	Afia Maulina, Mustafa Alkamal, Nabila Salsa Fahira (2021)	+ dan signifikan	+ dan tidak signifikan	
9.	Rina Tjandrakirana, Ermadiani, Abdul Rohman, Ahmad Widad (2019)			- dan tidak signifikan
10	Arta Pradana, Sunardi, Muhammad Fahmi (2022)			- dan tidak signifikan
11.	Rusdi Abdul Karim, Mursalim (2019)			+ dan signifikan

12.	Seniorita, Basri Modding, Andi Nirwana Nur, Ibrahim Dani (2022)			+ dan signifikan
-----	--	--	--	------------------

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh (Lathifa, 2019) dengan penambahan variabel Sistem Pengendalian Internal (SPI) dari penelitian yang dilakukan (Pradana et al., 2022). Penambahan variabel tersebut dikarenakan kualitas pengelolaan keuangan juga dilihat dari sistem yang mengontrolnya supaya tidak terjadi penyelewengan serta pengelolaan keuangan dapat tepat sasaran. Obyek penelitian yakni Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota se- Jawa Tengah dengan periode penelitian 2018-2022.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait pengaruh hubungan antara variabel independent Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terhadap variabel dependen kinerja keuangan pemerintah dengan belanja rutin dan dana perimbangan sebagai variabel kontrol.

Berdasarkan paparan diatas dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota se- Provinsi Jawa Tengah?

2. Bagaimana pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota se- Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimana pengaruh Sistem Pengendalian Internal (SPI) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota se- Provinsi Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan daripada penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh antara variabel dependen dan independent sebagai berikut:

1. Untuk menanalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota se- Provinsi Jawa Tengah
2. Untuk menganalisis pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota se- Provinsi Jawa Tengah
3. Untuk menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Internal (SPI) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota se- Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi menjadi 2 yaitu aspek teoritis dan aspek praktis:

1. Aspek teoritis

Hasil daripada penelitian dapat memberikan manfaat dan tujuan bagi para peneliti, ilmu ekonomi, dan akuntansi sektor publik untuk melakukan berbagai riset

terkait pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terhadap kinerja keuangan pemerintah.

2. Aspek praktis

Hasil daripada penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi pemerintah daerah untuk dapat menentukan kebijakan yang tepat terkait kinerja keuangan di masa mendatang dengan melihat faktor Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal, dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang dapat memberikan pengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Grand Theory

2.1.1 Teori Stewardship

Teori *stewardship* merupakan teori yang menjadi dasar terkait pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Donaldson & Davis, 1991 dalam (Hidayat et al., 2021) menyatakan bahwa teori *stewardship* didefinisikan sebagai teori yang memberi gambaran bahwa dalam menjalankan tugasnya manajer tidak termotivasi pada kepentingan pribadi melainkan memprioritaskan pencapaian sasaran organisasi. Asumsi dasar dari teori ini yakni adanya kepercayaan antara pemilik perusahaan sebagai *principal* dan manajer sebagai *steward*, yang mana apabila terdapat perbedaan kepentingan maka steward akan bekerja sama untuk menelaraskan kepentingan *principal* untuk mencapai tujuan organisasi.

Adanya peraturan perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah yang juga mengatur hubungan pemerintah dengan rakyat, maka teori *stewardship* dapat diterapkan di lingkungan sektor publik (Digdowiseiso&Subiyanto, 2022). Teori *stewardship* di lingkungan sektor publik digambarkan bahwa rakyat sebagai *principal* selaku pemilik sumber daya memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah sebagai *steward* untuk mengelola sumber daya yang berasal dari rakyat. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana eksistensi pemerintah daerah selaku organisasi sektor publik yang diberi

kepercayaan rakyat untuk dapat mengelola keuangan daerah secara efektif, ekonomis, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan untuk kemakmuran rakyat dan pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang baik diwujudkan dengan merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal daripada yang ditargetkan untuk tujuan pembangunan daerah yang bermuara pada kesejahteraan rakyat (Ramadhan, 2019). Sementara itu pengalokasian belanja modal yang tepat sasaran untuk memperoleh aset tetap dapat mendorong kinerja pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk rakyat.

Berdasarkan *stewardship theory* tujuan dari organisasi sektor publik dalam hal ini pemerintah daerah adalah mewujudkan pelayanan publik melalui pengelolaan keuangan yang baik untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan daerah, sehingga guna mencapai tujuan organisasi maka diperlukan *controlling* terhadap seluruh kegiatan pemerintahan (Warsito&Arza 2023). *Controlling* kinerja pemerintah daerah berfungsi untuk mengontrol kegiatan pemerintahan supaya tetap berpedoman pada tujuan organisasi, kegiatan tersebut diwujudkan dalam Sistem Pengendalian Internal (SPI). Kuatnya pengendalian internal pemerintah ditandai dengan sedikitnya temuan kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, semakin sedikit temuan kelemahan SPI hal tersebut mengindikasikan semakin baiknya kinerja keuangan pemerintah daerah (Tjandrakirana et al., 2019).

2.2 Variabel Penelitian

2.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan peraturan perundang- undangan Nomor 23 Tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber tertentu yang dipungut sesuai dengan Undang- Undang.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi pendapatan paling utama bagi daerah karena kontribusinya yang besar terhadap kesejahteraan rakyat (Lestari dan Hapsari, 2020). Begitu besar kontribusinya terhadap daerah, maka hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mampu menggali secara optimal potensi- potensi daerah yang dapat digunakan untuk menaikkan PAD. Apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dimaksimalkan maka hal tersebut dapat menekan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pendanaan dari pemerintah pusat (Sudarmana & Sudiarta, 2020).

Berdasarkan kebijakan pemerintah yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi: (1) pajak daerah, (2) retribusi daerah, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) lain- lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak daerah didefinisikan sebagai iuran yang diberikan warga negara kepada daerah yang imbalannya tidak diberikan secara langsung untuk membiayai penyelenggaraan daerah serta bersifat wajib dan memaksa berdasarkan peraturan perundang- undangan (Hafandi dan Romandhon, 2020).

Retribusi daerah merupakan pungutan kepada perorangan atau badan dalam pemberian jasa atau pemberian izin tertentu oleh pemerintah daerah kepada pihak yang bersangkutan yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hafandi dan Romandhon, 2020).

Menurut (Kireina dan Octaviani, 2021) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan salah satu komponen PAD yang terdapat dalam APBD yang didefinisikan sebagai hasil daripada kekayaan daerah yang dijadikan untuk menyertaan modal daerah pada perusahaan daerah yaitu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 lain- lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. Menurut (Fauziyah dan Ekaningtias, 2022) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$PAD = \text{pajak daerah} + \text{retribusi daerah} + \text{hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan} + \text{lain- lain pendapatan daerah yang sah}$$

2.2.2 Belanja Modal

Belanja modal merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh asset tetap dan asset lainnya yang memiliki manfaat selama lebih dari satu periode akuntansi (Maulina et al., 2021). Belanja modal bertujuan untuk memperoleh asset tetap pemerintah daerah, yang mana cara mendapatkannya melalui tender atau lelang (Niswani et al., 2022). Semakin maksimal penggunaan belanja modal hal tersebut berarti semakin bertambahnya asset tetap dan sarana prasarana suatu

daerah, sehingga hal tersebut dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan. Belanja modal dapat dipergunakan untuk investasi, apabila asset hingga sarana prasarana suatu daerah memadai maka hal tersebut akan menarik perhatian investor untuk berinvestasi (Dwigantara dan Handayani, 2021). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 belanja modal meliputi: (1) belanja modal tanah, (2) belanja modal peralatan dan mesin, (3) belanja modal gedung dan bangunan, (4) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, (4) belanja modal lainnya.

Belanja modal tanah merupakan semua pembelian/penyelesaian, penimbunan, pengosongan, balik nama, pembuatan sertifikat tanah atau pengeluaran lain yang bersifat administratif yang berkaitan dengan hak dan kewajiban atas kepemilikan tanah (Hailuddin et al., 2022).

Belanja modal atas peralatan dan mesin merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan dalam perolehan/pengadaan/ pembelian peralatan dan mesin yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun sampai dengan peralatan dan mesin tersebut siap untuk digunakan (Marlianita dan Saleh, 2020).

Belanja modal gedung dan bangunan didefinisikan sebagai semua biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan/ pembelian yang meliputi biaya konstruksi, pengurusan IMB, notaris, pajak yang bersifat kontraktual termasuk biaya pengawasan dan perencanaan sampai dengan gedung dan bangunan siap untuk digunakan (Huda dan Sumiati, 2019).

Menurut (Hailuddin et al., 2022) belanja modal jalan, irigasi dan jaringan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk untuk pembuatan jalan, irigasi dan

jaringan yang meliputi biaya konstruksi, biaya penggantian dan biaya penambahan masa manfaat lebih diatas satu tahun serta biaya lainnya sampai dengan jalan, irigasi dan jaringan siap untuk digunakan.

Menurut (Huda dan Sumiati, 2019) belanja modal lainnya didefinisikan sebagai pengeluaran yang digunakan untuk modal pengadaan modal lainnya selain modal tanah, gedung, bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Pengeluaran yang dimaksud adalah pengadaan/ pembelian/ penggantian/ perawatan fisik lainnya.

Menurut (Digdowisesiso et al., 2022) belanja modal dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Belanja modal = belanja tanah + belanja peralatan dan mesin + belanja gedung dan bangunan + belanja jalan, irigasi, jaringan + belanja modal lainnya

2.2.3 Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seluruh penyelenggara pemerintahan dengan terus menerus secara efektif, efisien, keandalan dalam pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan taat kepada peraturan perundang-undangan untuk menciptakan kepercayaan. Untuk meningkatkan keandalan pelaporan keuangan, maka pemerintah daerah harus memiliki sistem pengendalian internal yang baik. Sistem Pengendalian Internal (SPI) menjadi kontrol pada kinerja keuangan pemerintah, agar kinerja dapat terlaksana dengan baik.

Apabila pengendalian internal pada instansi pemerintah baik maka terjadinya *fraud* akan semakin kecil. Untuk mengontrol kinerja pemerintah daerah, sistem pengendalian internal menjadi sangat penting dan harus diterapkan secara menyeluruh di instansi pemerintah (Tjandrakirana et al., 2019). Semakin sedikit temuan kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI) hal tersebut menunjukkan semakin baik pula pengendalian internal di suatu instansi sehingga keandalan laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam islam pengendalian internal merupakan hal yang penting yang harus dijunjung tinggi prinsipnya (Sudarmanto dan Utami, 2021). Prinsip pengendalian internal tercantum pada ayat-ayat Al-Qur'an diantaranya QS Al-Mujadalah ayat 7 yang berbicara tentang pengendalian internal secara luas dan khusus, QS Al-Muthaffifin ayat 1-6 tentang perilaku curang, QS Ash-Shaf ayat 2-3 tentang perilaku integritas.

Temuan kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI) didapat dari Laporan Hasil Pemeriksaan. Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2006 pasal 1 angka 14 terkait Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Laporan Hasil Pemeriksaan merupakan laporan tertulis daripada hasil dari pemeriksaan kebenaran, kredibilitas, keandalan informasi, serta kepatuhan terkait pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan terdapat tiga indikator temuan SPI pada pemerintah daerah yang terdiri dari: (1) kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, (2) kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, (3) kelemahan struktur pengendalian internal. Menurut (Tjandrakirana et al., 2019) Sistem Pengendalian Internal (SPI) dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$SPI = \sum \text{temuan SPI}$$

2.2.4 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, otonomi daerah merupakan pemberian hak, wewenang, dan kebijakan setiap daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya termasuk pengelolaan keuangan daerah. Pemberian kewenangan tersebut juga termasuk wewenang untuk dapat mengelola keuangan daerahnya secara mandiri yang dipergunakan untuk pembangunan daerah. Pengelolaan potensi daerah berdampak pada kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik dan optimal dapat menjamin peningkatan pembangunan daerah sehingga kinerja pemerintah daerah dikatakan berhasil (Sari & Mustanda, 2019).

Menurut (Dwigantara&Handayani, 2021) kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan ukuran kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diukur dalam satuan uang dengan semua kekayaan milik daerah. Pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk dilakukan, hal tersebut menjadi bahan evaluasi dan pengawasan kinerja karyawan, organisasi, hingga operasional apakah sesuai dengan sasaran, target, hingga kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dalam melakukan kegiatan pengelolaan keuangan maka pimpinan suatu instansi harus melakukan pengendalian atas penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut bertujuan untuk

mencapai pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan serta akuntabel. Menurut (Tjandrakirana et al., 2019) dalam melakukan pengelolaan keuangan setiap instansi wajib menyelenggarakan sistem pengendalian internal sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna meningkatkan keandalan pelaporan keuangan.

Kinerja pemerintah dapat dicerminkan dari laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Istiza&Febelin, 2021). Menurut peraturan perundang-undangan nomor 23 tahun 2014 Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan laporan yang berisi realisasi keuangan yakni pendapatan, belanja, surplus/deficit, hingga sisa lebih atau kurang pembayaran selama satu tahun anggaran yang dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Laporan realisasi APBD memiliki peranan penting dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Melalui evaluasi tersebut pemerintah daerah dapat memperkirakan penerimaan dan pemasukan serta sumbernya dan kebijakan-kebijakan pada tahun anggaran berikutnya. Kinerja keuangan diukur dengan menggunakan rasio-rasio berikut:

1. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan merupakan rasio yang memperlihatkan kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatannya yang dibandingkan dengan periode sebelumnya guna mengevaluasi potensi daerah yang masih memerlukan perhatian khusus (Lathifa dan Haryanto, 2019). Rasio pertumbuhan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio pertumbuhan} = \frac{(\text{pendapatan daerah } t) - (\text{pendapatan daerah } t - 1)}{\text{pendapatan daerah } t - 1}$$

2. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas merupakan rasio yang memperlihatkan kemampuan daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan (Mulyaningsih et al., 2022). Rasio efektivitas digunakan dalam penelitian ini yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{realisasi pendapatan asli daerah}}{\text{anggaran pendapatan asli daerah}} \times 100\%$$

3. Rasio Efisiensi

Menurut (Mulyaningsih et al., 2022) produktivitas suatu daerah tergantung dari hasil perhitungan dengan menggunakan rasio efisiensi. Rasio efisiensi adalah pengukuran kinerja keuangan pemerintah yang membandingkan antara realisasi belanja daerah dengan pendapatan daerah. Berikut merupakan rumus daripada rasio efisiensi:

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{realisasi belanja daerah}}{\text{realisasi pendapatan daerah}} \times 100\%$$

4. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian merupakan rasio yang merepresentasikan kemampuan daerah untuk membiayai daerahnya sendiri tanpa harus menunggu pendanaan dari pusat (Latifah dan Amalia, 2022). Rasio kemandirian dihitung dengan

membandingkan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan dana transfer dari pusat. Berikut merupakan rumus perhitungan rasio kemandirian:

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{pendapatan asli daerah}}{\text{pendapatan transfer}} \times 100\%$$

5. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas merupakan perhitungan rasio dengan menggunakan dua perhitungan yakni belanja operasi dan belanja modal (Mulyaningsih et al., 2022). Rasio aktivitas dengan belanja modal memperlihatkan perbandingan antara belanja modal dengan belanja daerah, sementara rasio aktivitas dengan belanja operasional memperlihatkan perbandingan antara belanja operasi dengan belanja daerah. Apabila prosentase belanja operasi lebih tinggi daripada belanja modal berarti dana lebih banyak dialokasikan untuk kebutuhan rutin disbanding untuk pemenuhan infrastruktur daerah. Berikut merupakan rumus perhitungan rasio aktivitas:

$$\text{Rasio aktivitas belanja modal} = \frac{\text{total belanja modal}}{\text{total belanja daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio aktivitas belanja operasi} = \frac{\text{total belanja operasi}}{\text{total belanja daerah}} \times 100\%$$

2.2.5 Dana Perimbangan

Menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer di tiap daerah sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Setiap tahunnya dana perimbangan tercantum dalam APBN dalam

bentuk prosentase. Dana perimbangan juga memiliki peranan tersendiri dalam pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dana perimbangan meliputi: (1) Dana Bagi Hasil, (2) Dana Alokasi Umum, (3) Dana Alokasi Khusus.

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat menjadi DBH merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang memiliki tujuan yakni untuk mendanai daerah dalam rangka perwujudan desentralisasi. Dana Bagi Hasil (DBH) berupa bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan tiap daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan (Digdowiseiso&Subiyanto, 2022).

Dana Alokasi Umum (DAU) didefinisikan sebagai dana yang dialokasikan ke daerah yang berasal dari pendapatan APBN untuk tujuan pemerataan keuangan antar-daerah. Pengalokasian DAU berdasarkan prosentase masing- masing daerah yang menekankan pada aspek keadilan dan pemerataan dalam rangka desentralisasi (Digdowiseiso dan Subiyanto, 2022).

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat menjadi DAK merupakan dana yang dialokasikan ke daerah yang berasal dari pendapatan APBN yang bertujuan untuk mendanai kegiatan khusus pemerintah daerah sesuai dengan prioritas nasional berdasarkan peraturan pemerintah.

Tujuan dari dana perimbangan adalah untuk menghilangkan kesenjangan antara pemerintah pusat dengan daerah, dan antar pemerintah daerah dalam hal finansial (Istiza et al., 2021). Dengan adanya pengalokasian dari dana perimbangan

diharapkan mampu meningkatkan kemampuan fiskal daerah untuk menggali semua sumber daya daerah yang dapat menjadi potensi untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Menurut (Digdowisesios et al., 2022) dana perimbangan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Dana perimbangan = realisasi DBH + realisasi DAU + realisasi DAK

2.2.6 Belanja Rutin

Belanja rutin didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBD yang dikeluarkan untuk mendanai kegiatan rutin instansi dalam jangka waktu tertentu atau memiliki jangka waktu yang pendek (Lathifa&Haryanto, 2019). Belanja rutin bertujuan untuk membiayai tugas- tugas umum pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Menurut (Syamsuddin et al., 2022) komponen belanja rutin meliputi: (1) belanja pegawai, (2) belanja barang, (3) belanja bunga, (4) belanja subsidi, (5) belanja hibah, (6) belanja bantuan sosial, (7) belanja bantuan keuangan.

Belanja pegawai merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang ditujukan kepada pegawai negeri, pejabat pemerintahan, pegawai honorer, dan pegawai yang telah pensiun baik didalam maupun luar negeri sebagai bentuk imbalan atas kewajiban yang telah dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Belanja barang didefinisikan sebagai dana yang dikeluarkan untuk tujuan pengadaan/pembelian/perolehan barang atau jasa. Dimana pengadaan barang dimaksudkan untuk dijual ke masyarakat diluar bantuan sosial dan belanja

perjalanan untuk memenuhi kebutuhan satuan kerja guna menunjang tercapainya target dan sasaran kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Belanja bunga didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBD yang dikeluarkan untuk membayar bunga atas kewajiban pokok pemerintah baik di dalam maupun luar negeri yang diperoleh dengan perhitungan yang sudah sesuai dengan ketentuan serta perkiraan kewajiban di masa depan hingga pengelolaannya.

Belanja subsidi didefinisikan sebagai pengalokasian dana kepada perusahaan daerah atau lembaga dalam melakukan kegiatan jual, beli, ekspor, impor barang atau jasa dalam rangka pemenuhan hajat hidup orang banyak yang harga jualnya masih dapat dijangkau oleh masyarakat.

Belanja hibah didefinisikan sebagai dana yang dikeluarkan pemerintah pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer kepada pemerintah daerah, BUMN, BUMD, pemerintah negara lain, serta organisasi internasional yang memiliki sifat tidak terikat dan sukarela dalam bentuk uang, barang atau jasa. Penyerahan hibah dibuktikan dengan adanya perjanjian tertulis antara pemberi dan penerima hibah.

Belanja bantuan sosial didefinisikan sebagai dana yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk diberikan kepada masyarakat guna menghindari terjadinya ketimpangan sosial seperti krisis ekonomi, sosial, politik hingga bencana alam yang apabila tidak diberikan bantuan sosial akan memperburuk keadaan. Belanja bantuan sosial diberikan biasanya dalam bidang pendidikan, keagamaan, kesehatan, dan bidang lain.

Belanja bantuan keuangan didefinisikan sebagai dana yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk diberikan kepada penerima bantuan keuangan untuk tujuan pemerataan keuangan daerah. Menurut (Lathifa dan Haryanto, 2019) belanja rutin diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Belanja rutin = belanja pegawai + belanja barang + belanja bunga + belanja subsidi + belanja hibah + belanja bantuan sosial + belanja bantuan keuangan

2.3 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yaitu:

Tabel 2. 1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013- 2017 Hasna Lathifa dan Haryanto (2019)	Dependen: Kinerja keuangan pemerintah daerah Independen: - Pendapatan Asli Daerah - belanja modal Kotrol: - Dana perimbangan - belanja rutin - populasi	1) Pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 2) Belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

2.	<p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>Afia Maulina , Mustafa Alkamal, Nabilla Salsa Fahira (2021)</p>	<p>Dependen: Kinerja keuangan pemerintah daerah</p> <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PAD - Dana perimbangan - Belanja modal - Ukuran pemerintah daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 2) Dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 3) Belanja modal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 4) Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
3.	<p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada 19 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2020</p> <p>Joni Fernandes dan Silviani Putri (2022)</p>	<p>Dependen: Kinerja keuangan pemerintah daerah</p> <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PAD - Belanja modal 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 2) Belanja Modal berpengaruh secara positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
4.	<p>Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli</p>	<p>Dependen: Kinerja keuangan pemerintah daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja

	<p>Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2020</p> <p>Novita Niswani (2022)</p>	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PAD - Dana perimbangan - Belanja modal 	<p>keuangan pemerintah daerah</p> <p>2) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</p> <p>3) Dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</p>
5.	<p>Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Provinsi Sumatera Bagian Selatan)</p> <p>Arta Pradana, Sunardi, Muhammad Fahmi (2022)</p>	<p>Dependen: Kinerja keuangan pemerintah daerah</p> <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran pemerintah daerah - Kemakmuran - Intergovernmental revenue - Sistem pengendalian internal 	<p>1) Ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</p> <p>2) Kemakmuran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</p> <p>3) Intergovernmental revenue berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</p> <p>4) Sistem Pengendalian Intern berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</p>
6.	<p>Pengaruh Pertumbuhan Belanja, Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Legislatif, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja</p>	<p>Dependen: Kinerja keuangan pemerintah daerah</p> <p>Independen:</p>	<p>1) Pertumbuhan belanja modal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</p> <p>2) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif tidak</p>

	Keuangan Pemerintah Daerah Indrani Nuzul Fauziyah & Diah Ekaningtias (2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan belanja modal - PAD - Ukuran legislatif - Dana perimbangan 	<p>signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan efektivitas</p> <p>3) Ukuran legislatif berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</p> <p>4) Dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</p>
7.	Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2013-2018) Endri Lestari & Dini Wahjoe Hapsari (2020)	<p>Dependen: Kinerja keuangan pemerintah daerah</p> <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PAD - Belanja modal - Opini audit 	<p>1) Belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</p> <p>2) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</p> <p>3) Opini audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</p>
8.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja	Dependen: Kinerja keuangan pemerintah daerah	1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

	<p>Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat</p> <p>Ihsan Wahyudin dan Hastuti (2020)</p>	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PAD - Dana perimbangan - Belanja modal 	<p>2) Dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</p> <p>3) Belanja modal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</p>
9.	<p>Pengaruh Laporan Hasil Pemeriksaan, Ketidakpatuhan pada Peraturan, Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, dan Tindak Lanjut Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Selatan</p> <p>Rina Tjandrakirana, Ermadiani, Abdul Rohman, Ahmad Widad (2019)</p>	<p>Dependen: Kinerja keuangan pemerintah daerah</p> <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan hasil pemeriksaan - Ketidakpatuhan pada peraturan - Kelemahan sistem pengendalian intern - Tindak lanjut pemeriksaan 	<p>1) Laporan Hasil Pemeriksaan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</p> <p>2) Ketidakpatuhan pada peraturan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</p> <p>3) Kelemahan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</p> <p>4) Tindak lanjut pemeriksaan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</p>
10.	<p>Pengaruh Kompetensi Aparatur Dan Sistem</p>	<p>Dependen: Kinerja keuangan pemerintah daerah</p>	<p>1) Kompetensi aparatur berpengaruh positif signifikan terhadap tata Kelola yang baik</p>

	<p>Pengendalian Internal Terhadap Tata Kelola Yang Baik Dan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah. Kabupaten Pangkep</p> <p>Seniorita, Basri Modding, Andi Nirwana Nur, dan Ibrahim Dani (2022)</p>	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kompetensi Aparatur - Sistem Pengendalian Internal <p>Intervening: Tata Kelola yang baik</p>	<p>2) Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap tata kelola yang baik</p> <p>3) Kompetensi aparatur berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</p> <p>4) Sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah.</p>
--	--	--	--

2.4 Kerangka Penelitian Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari potensi- potensi daerah sebagai wujud dari desentralisasi daerah (Istiza et al., 2021). Kemandirian suatu daerah dapat terlihat dari kemampuan suatu daerah dalam menaikkan Pendapatan Asli Daerah (Istiza et al., 2021). Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah maka semakin kecil pula ketergantungan daerah terhadap pendanaan dari pusat. Dengan demikian pemerintah daerah harus memperhatikan setiap potensi daerahnya supaya dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai daerahnya sendiri.

Semakin besar angka Pendapatan Asli Daerah pada APBD hal tersebut berarti pengelolaan potensi- potensi daerahnya semakin baik dengan demikian menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah membaik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lathifa & Haryanto (2019) yang menyatakan bahwa peningkatan daripada angka pada Pendapatan Asli Daerah akan menyebabkan meningkatnya pula kinerja keuangan pemerintah daerah. Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh (Istiza et al., 2021) dan Digdowiseiso *et al.*, (2022) yang menunjukkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dari uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ :Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.4.2 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Belanja modal merupakan realisasi anggaran yang digunakan untuk memperoleh asset tetap atau asset lainnya dalam satu periode akuntansi. Produktifitas penggunaan anggaran tercemin dari pengalokasian belanja modal (Digdowiseiso,2022). Semakin maksimal penggunaan belanja modal hal tersebut berarti semakin bertambahnya asset tetap dan sarana parasarana suatu daerah, sehingga hal tersebut dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu apabila pengalokasian belanja modal dilakukan dengan tepat yang berdampak pada perkembangan infrastruktur maka hal tersebut juga dapat meningkatkan produktivitas masyarakat yang berdampak pada pembangunan daerah.

Pengalokasian belanja modal untuk menambah sarana infrastruktur dapat menunjang terjadinya peningkatan kinerja keuangan pemerintah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lathifa & Haryanto (2019) dan Sari & Mustanda (2019) yang menyatakan bahwa meningkatnya belanja modal mempengaruhi peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Niswani (2022) dan Fauziah & Ekaningtias (2022) yang menunjukkan hasil bahwa belanja modal berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dari uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ :Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.4.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

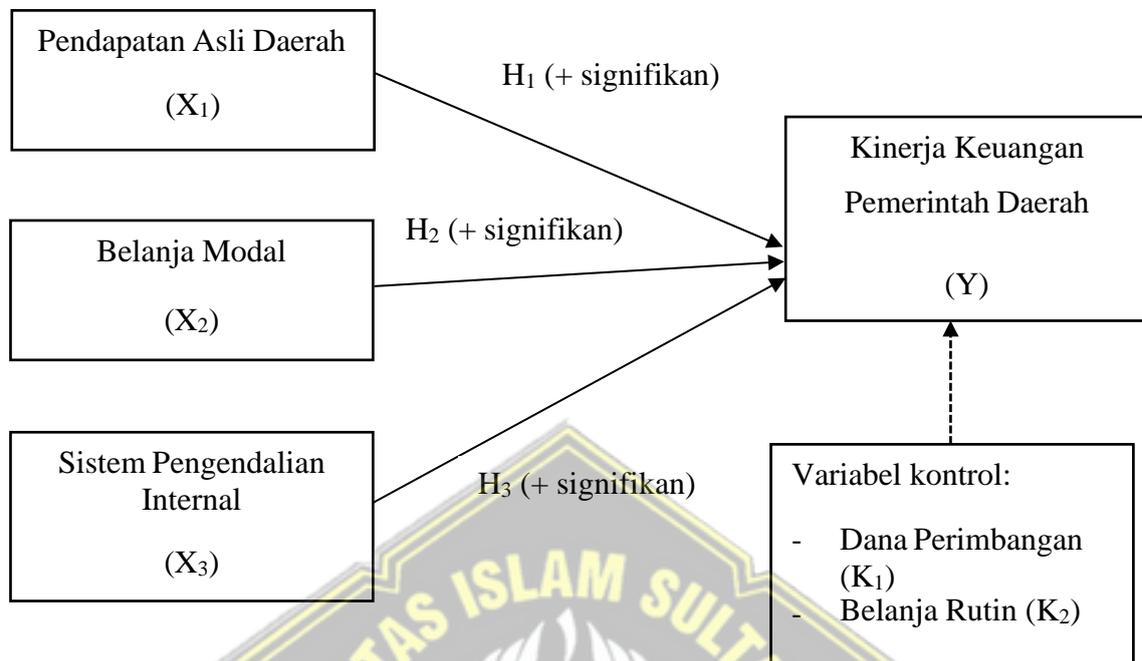
Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menyatakan bahwa sistem pengendalian pemerintah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seluruh penyelenggara pemerintahan dengan terus menerus secara efektif, handal, dan taat kepada peraturan perundang-undangan untuk menciptakan kepercayaan. Untuk meningkatkan keandalan pelaporan keuangan, maka pemerintah daerah harus memiliki sistem pengendalian internal yang baik. Sistem Pengendalian Internal (SPI) menjadi kontrol pada kinerja keuangan pemerintah, agar kinerja dapat terlaksana dengan baik.

Apabila pengendalian internal pada instansi pemerintah baik maka terjadinya *fraud* akan semakin kecil. Sehingga menunjukkan controlling pemerintah yang baik yang berdampak pada meningkatkan kualitas kinerja keuangan pemerintah daerah. Sistem Pengendalian Internal (SPI) diukur dengan menggunakan jumlah temuan SPI. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Seniorita et al., (2022) dan Karim & Mursalim (2019) yang menyatakan bahwa semakin baik Sistem Pengendalian Internal maka semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah daerah. Dari uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ :Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

2.5 Kerangka Penelitian

Kerangka pemikiran teoritis merupakan konsep mengenai korelasi antara satu variabel dengan variabel lainnya. Maksudnya, kerangka penelitian ini memberikan konsep atau gambaran bagaimana variabel satu dengan variabel lainnya saling terkait. Keterkaitan ini didukung dengan teori dan data yang ada. Berikut merupakan kerangka pemikiran dari penelitian ini



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian kuantitatif dan eksplanatori. Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang banyak menggunakan angka- angka mulai dari pengumpulan data hingga pengolahan hasilnya dan penarikan kesimpulannya (Machali, 2021). Penelitian eksplanatori (explanatory research) merupakan penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis melalui teori- teori yang digunakan dalam penelitian serta bahan empiris lainnya (Zaluchu, 2020). Pemaparan pada jenis penelitian ini adalah dengan mengartikan angka- angka yang dibantu gambar, tabel, dan grafik. Pengolahan data yang digunakan menggunakan alat uji statistic, karena data- data yang diperoleh berupa angka- angka.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekelompok orang, peristiwa yang memiliki ciri tertentu. jadi populasi merupakan subjek atau bahan yang digunakan dalam penelitian yang nantinya dapat memberi informasi dengan karakteristik tertentu sesuai dengan apa yang hendak diteliti. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 29 kabupaten dan 6 kota se-Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018- 2022 yang telah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bagian daripada populasi disebut sampel. Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini yakni sensus sampling (sampling jenuh). Menurut (Ulfa, 2021) sensus sampling

merupakan penentuan sampel penelitian dimana seluruh populasi penelitian digunakan sebagai sampel.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kuantitatif karena data yang digunakan untuk menganalisa berupa angka- angka untuk menguji seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian. Sumber data pada penelitian merupakan data sekunder. Definisi daripada data sekunder itu sendiri merupakan data yang sudah jadi yang diperoleh peneliti melalui perantara atau orang lain berupa angka. Data sekunder yang digunakan adalah Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 29 kabupaten dan 6 kota se-Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2022 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah serta Laporan Hasil Pemeriksaan Periode 2018- 2022 yang diperoleh melalui *website* Badan pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dokumentasi atau pengarsipan. Metode ini berupa mencatat, mengelompokkan, dan mengolah hasil yang berhubungan dengan penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan data ini digunakan guna mendapatkan data terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal, dana perimbangan dan belanja rutin dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan untuk data terkait Sistem Pengendalian Internal diperoleh dari *website* BPK Perwakilan Jawa Tengah.

3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.5.1 Definisi Operasional Variabel

Variabel didefinisikan sebagai suatu subyek yang memiliki ragam yang berbeda antar obyek (Ulfa, 2021). Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yaitu variabel dependen, variabel independen dan variabel kontrol. Berikut merupakan definisi dari setiap variabel:

1. Variabel Dependen

Variabel dependen (Y) merupakan variabel terikat yang besarnya tergantung dari variabel lain atau besarnya tergantung dari variabel lain. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan pengukuran kinerja pemerintahan yang diukur dalam satuan uang dengan semua kekayaan milik daerah (Dwigantara & Handayani, 2021). Menurut (Sari & Mustanda, 2019) pengelolaan keuangan daerah yang baik dan optimal dapat menjamin peningkatan Pembangunan daerah sehingga kinerja pemerintah daerah dapat dikatakan berhasil.

2. Variabel Independen

Variabel independent (X) merupakan variabel yang apabila muncul dapat mempengaruhi variabel lainnya yaitu variabel dependen. Terdapat tiga variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Pendapatan Asli Daerah

Menurut PP Nomor 23 Tahun 2014 pendapatan asli daerah didefinisikan sebagai penerimaan daerah yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain- lain pendapatan daerah yang sah. Menurut (Lestari & Hapsari, 2020) pendapatan asli daerah menjadi pendapatan paling utama bagi daerah karena kontribusinya yang besar terhadap kesejahteraan rakyat, sehingga pemerintah harus mampu menggali semua potensi- potensi daerahnya.

b. Belanja Modal

Belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran guna perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dalam rangka pemenuhan infrastruktur daerah (Maulina & Alkamal, 2021). Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, belanja modal lainnya.

c. Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian internal Pemerintah, Sistem pengendalian internal merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan penyelenggara pemerintahan secara terus menerus dengan efektif, efisien, keandalan dalam pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan taat kepada peraturan perundang- undangan untuk menciptakan kepercayaan. Menurut (Tjadrakirana et al., 2019) sistem pengendalian internal merupakan controlling yang harus diterapkan secara menyeluruh di instansi pemerintah.

3. Variabel Kontrol

Variabel kontrol merupakan variabel yang dibuat konstan supaya pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen tidak dipengaruhi faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol memiliki peran mengontrol variabel dependen. Terdapat dua variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Dana Perimbangan

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari APBN yang ditransfer di tiap daerah sesuai dengan kebutuhan daerahnya yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana perimbangan bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan antara pemerintah pusat dengan daerah, dan antar pemerintah daerah dalam hal finansial (Istiza et al., 2021).

b. Belanja Rutin

Belanja rutin didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBD yang dikeluarkan untuk mendanai kegiatan rutin instansi dalam jangka waktu tertentu (Lathifa & Haryanto, 2019). Menurut (Syamsudin et., al 2022) belanja rutin meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, serta belanja bantuan keuangan.

3.5.2 Pengukuran Variabel

Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

No	Variabel	Definisi Konsep	Pengukuran
1.	Kinerja keuangan pemerintah daerah	Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan pengukuran kinerja pemerintahan yang diukur dalam satuan uang dengan semua kekayaan milik daerah. Dwigantara dan Handayani (2021)	Rasio Efektivitas $= \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$ Mulyaningsih et al., (2022)
2.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan Asli Daerah yang kemudian disingkat menjadi PAD didefinisikan sebagai penerimaan daerah yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain- lain pendapatan daerah yang sah. PP No 23 Tahun 2014	Pendapatan Asli Daerah $= \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan} + \text{Lain- lain pendapatan asli daerah yang sah}$ Fauziyah dan Ekaningtias (2022)
3.	Belanja Modal	Belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran guna perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memiliki manfaat selama lebih dari satu periode akuntansi dalam rangka pemenuhan infrastruktur daerah	Belanja modal = belanja tanah + belanja peralatan dan mesin + belanja gedung dan bangunan + belanja jalan, irigasi, jaringan + belanja modal lainnya Digdowiseiso et al., (2022)

		Maulina dan Alkamal (2021)	
4.	Sistem Pengendalian Internal (SPI)	Sistem Pengendalian Internal merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan penyelenggara pemerintahan secara terus menerus dengan efektif, efisien, keandalan dalam pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan taat kepada peraturan perundang-undangan untuk menciptakan kepercayaan PP Nomor 60 Tahun 2008	SPI = Jumlah temuan kelemahan SPI Tjandrakirana <i>et al.</i> , (2019)
5.	Dana Perimbangan	Dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari APBN yang ditransfer di tiap daerah sesuai dengan kebutuhan daerahnya. UU No. 23 Tahun 2014	Dana Perimbangan = realisasi (DAU + DAK + DBH) Digdowiseiso <i>et al.</i> , (2022)
6.	Belanja Rutin	Belanja rutin merupakan dana yang dikeluarkan untuk mendanai kegiatan rutin instansi dalam jangka waktu tertentu atau memiliki jangka waktu yang pendek Lathifa dan Haryanto (2019)	Belanja Rutin = belanja pegawai + belanja barang + belanja bunga + belanja subsidi + belanja hibah + belanja bantuan sosial Lathifa dan Haryanto (2019)

3.6 Teknik Analisis Data

Berdasarkan rumusan masalah serta hipotesis, maka teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data untuk menguji hipotesis dan

memecahkan masalah. Adapun alat statistic yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS versi 25.

3.6.1 Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif berfungsi untuk memberikan gambaran pada data yang disajikan. Data penelitian yang terdapat pada penelitian ini meliputi kinerja keuangan, pendapatan asli daerah, belanja modal, sistem pengendalian internal, dana perimbangan, serta belanja rutin. Alat statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini yakni nilai minimum, nilai maksimum, *mean* dan standar deviasi.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji regresi linier berganda dapat dilakukan apabila dapat lolos melalui uji asumsi klasik serta memenuhi asumsi *Best Linear Unbias Estimator* (BLUE). Dengan demikian perlu dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah residual data pada model regresi linier berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji kolmogrov simirnov. Adapun pengujian normalitas data dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa distribusi residual data penelitian adalah normal

- b. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa distribusi residual data penelitian tidak normal

2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui korelasi residual periode pengamatan dengan pengamatan sebelumnya, melalui deteksi *Durbin Watson*. Kriteria uji *Durbin Watson (DW)* adalah apabila angka DW berada di dU sampai dengan 4-dU maka dinyatakan bebas autokorelasi.

3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas (independen). Regresi data panel yang baik adalah jika antar variabel bebas tidak terdapat korelasi. Namun apabila terdapat korelasi antar variabel bebas maka dapat mengganggu hubungan variabel terikat (dependen) dengan variabel bebas (independent). Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas adalah dengan melihat *Centered Varians Inflation Factors (VIF)*, apabila $VIF < 10$ maka tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya kesamaan varians dari residual satu pengamatan dengan pengamatan lainnya dalam satu model regresi. Model regresi yang baik adalah tidak mengalami heteroskedastisitas. Apabila nilai probabilitas $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas, namun apabila nilai probabilitas < 0.05 maka terjadi heteroskedastisitas atau tidak lolos uji.

3.6.3 Model Regresi Linier Berganda

Pada penelitian ini pengujian hipotesis dilakukan melalui analisis regresi linier berganda. Uji regresi berganda dilakukan dengan mengestimasi variabel dependen (Y) dengan lebih dari satu variabel independen (X). Berikut merupakan rumus yang digunakan dalam analisa regresi linier berganda:

$$KKPD = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 BM + \beta_3 SPI + \beta_4 DP + \beta_5 BR + e_i$$

Keterangan:

KKPD = kinerja keuangan pemerintah daerah

α = konstanta regresi

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = koefisien regresi variabel independen (pendapatan asli daerah, belanja modal, dan sistem pengendalian internal)

β_4 dan β_5 = koefisien regresi variabel kontrol (dana perimbangan dan belanja rutin)

PAD = pendapatan asli daerah (variabel independen)

BM = belanja modal (variabel independen)

SPI = sistem pengendalian internal (variabel independen)

DP = dana perimbangan (variabel kontrol)

BR = belanja rutin (variabel kontrol)

e_i = koefisien error

3.6.4 Uji Kelayakan Model

1. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel- variabel independent secara bersama- sama mempengaruhi variabel dependen. Uji kelayakan model dengan Uji F dapat dideteksi melalui langkah berikut:

a. Menentukan Hipotesis Statistik

$H_0: \beta_i = 0$, maka secara simultan variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

$H_a: \beta_i \neq 0$, maka secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

b. Tingkat Signifikansi

Tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ atau 0,05, hal tersebut berarti toleransi tingkat kesalahan adalah 0,05.

c. Penilaian Kriteria Keputusan

- Apabila tingkat signifikansi $< 0,05$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
- Apabila tingkat signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

2. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi yang kemudian dilambangkan oleh *Adjusted R²* digunakan untuk mengetahui seberapa mampu variabel dependen dijelaskan oleh variabel independennya. Semakin tinggi koefisien determinasi maka semakin mampu variabel independent menjelaskan variabel dependen (Ulfa, 2021).

3.6.5 Pengujian Hipotesis Statistik (Uji t)

Pengujian hipotesis perlu dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Pengujian hipotesis secara parsial melalui Uji t dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menentukan Hipotesis Statistik
 - $H_0 : \beta_i = 0$, maka secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen
 - $H_a : \beta_i \neq 0$, maka secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen
- b. Tingkat Signifikansi

Tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ atau 0,05, hal tersebut berarti toleransi tingkat kesalahan adalah 0,05.

- c. Penilaian Kriteria Keputusan

- Apabila tingkat signifikansi $< 0,05$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- Apabila tingkat signifikansi $> 0,05$ maka H_a ditolak dan H_0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) dan Laporan Hasil Pemeriksaan kabupaten dan kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022. Data penelitian diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah dan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Tengah. Obyek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kabupaten/kota yang berjumlah 29 kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018-2022.

Sampel penelitian sebanyak 35 kabupaten/kota yang diperoleh dengan menggunakan metode sensus sampling. Data berupa pooled data yakni penggabungan *cross section* dan *time series* selama 5 tahun, dengan demikian jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 175 sampel data.

Berikut merupakan tabel sampel penelitian:

Tabel 4. 1

Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota
1	Kab. Banjarnegara
2	Kab. Banyumas
3	Kab. Batang
4	Kab. Blora
5	Kab. Boyolali
6	Kab. Brebes

7	Kab. Cilacap
8	Kab. Demak
9	Kab. Grobogan
10	Kab. Jepara
11	Kab. Karanganyar
12	Kab. Kebumen
13	Kab. Kendal
14	Kab. Klaten
15	Kab. Kudus
16	Kab. Magelang
17	Kab. Pati
18	Kab. Pekalongan
19	Kab. Pemalang
20	Kab. Purbalingga
21	Kab. Purworejo
22	Kab. Rembang
23	Kab. Semarang
24	Kab. Sragen
25	Kab. Sukoharjo
26	Kab. Tegal
27	Kab. Temanggung
28	Kab. Wonogiri
29	Kab. Wonosobo
30	Kota Magelang
31	Kota Pekalongan
32	Kota Salatiga
33	Kota Semarang
34	Kota Surakarta
35	Kota Tegal

4.2 Analisis Data

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian melalui data sampel yang digunakan dalam penelitian, penjelasan kelompok melalui nilai minimum, maksimum, median, rata-rata, serta standar

deviasi (Fernandes dan Putri, 2022). Analisis deskriptif pada penelitian ini mencakup variabel kinerja keuangan pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, belanja modal, sistem pengendalian internal serta variabel kontrol dana perimbangan dan belanja rutin yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

		Pendapatan Asli Daerah	Belanja Modal	Sistem Pengendalian Internal	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Dana Perimbangan	Belanja Rutin
N	Valid	175	175	175	175	175	175
	Missing	0	0	0	0	0	0
Mean		435,4211	357,0036	7,49	1,0822	1327,0537	1547,3015
Median		356,7500	296,3000	7,00	1,0700	1331,5141	1519,5416
Std. Deviation		333,26341	266,21405	3,303	,12259	361,05589	505,93402
Minimum		179,22	116,54	1	,81	522,04	219,26
Maximum		2545,99	2838,87	24	1,44	2304,33	3812,76

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 25

Berdasarkan hasil pengolahan data statistik pada tabel 4.1 terdapat sebanyak 175 data dengan masing- masing variabel meliputi nilai mean, nilai median, standar deviasi, nilai minimum serta nilai maksimum.

Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah dengan nilai maksimum sebesar 1,44 yang dicapai oleh Kabupaten Purworejo pada tahun 2021. Sedangkan nilai minimum sebesar 0,81 yang dicapai Kabupaten Pekalongan pada tahun 2022. Nilai mean 1,0822 lebih besar dari nilai median yaitu 1,0700 artinya nilai mean terletak dibagian kanan

kurva distribusi frekuensi, sehingga kurva kinerja keuangan pemerintah daerah miring ke bagian kanan. Dengan demikian rata-rata sampel kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki nilai yang tinggi. Nilai rata-rata sebesar 1,0822 lebih besar dari standar deviasi yaitu 0,12259, yang berarti data menyebar secara merata.

Variabel independen (X1) dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah dengan nilai maksimum sebesar 2545,99 yang dicapai oleh Kota Semarang pada tahun 2022. Sedangkan nilai minimum sebesar 179,22 yang dicapai Kota Pekalongan pada tahun 2018. Nilai mean 435,4211 lebih besar dari nilai median 356.7500 berarti nilai mean terletak dibagian kanan kurva distribusi frekuensi, sehingga kurva pendapatan asli daerah miring ke bagian kanan. Dengan demikian rata-rata sampel pendapatan asli daerah memiliki nilai yang tinggi. Nilai rata-rata sebesar 435,4211 lebih besar dari standar deviasi yaitu 333,2634, yang berarti data menyebar secara merata.

Variabel independen (X2) dalam penelitian ini adalah belanja modal dengan nilai maksimum sebesar 2838,87 yang dicapai oleh Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2021. Sedangkan nilai minimum sebesar 116,54 yang dicapai Kota Magelang pada tahun 2020. Nilai mean 357,0036 lebih besar dari nilai median yaitu 296,3000 artinya nilai mean terletak dibagian kanan kurva distribusi frekuensi, sehingga belanja modal miring ke bagian kanan. Dengan demikian rata-rata sampel belanja modal memiliki nilai yang tinggi. Nilai rata-rata sebesar 357,0036 dengan standar deviasi yaitu 266,21405. Nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi, yang artinya data menyebar secara merata.

Variabel independen (X3) dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian internal dengan nilai maksimum sebesar 24 yang dicapai oleh Kota Semarang pada tahun 2022. Sedangkan nilai minimum sebesar 1 yang dicapai Kota Magelang pada tahun 2019. Nilai mean 7,49 lebih besar dari nilai median yaitu 7,00 artinya nilai mean terletak dibagian kanan kurva distribusi frekuensi, sehingga kurva sistem pengendalian internal miring ke bagian kanan. Dengan demikian rata-rata sampel sistem pengendalian internal memiliki nilai yang tinggi. Nilai rata-rata sebesar 7,49 lebih besar dari standar deviasi yaitu 3,303, yang artinya data menyebar secara merata.

Variabel kontrol (X4) dalam penelitian ini adalah dana perimbangan dengan nilai maksimum sebesar 2304,33 yang dicapai oleh Kabupaten Brebes pada tahun 2022. Sedangkan nilai minimum sebesar 522,04 yang dicapai Kota Salatiga pada tahun 2020. Nilai mean 1327,05371 lebih kecil dari nilai median yaitu 1331,5141 artinya nilai mean terletak dibagian kiri kurva distribusi frekuensi, sehingga kurva dana perimbangan miring ke bagian kiri. Hal tersebut menunjukkan rata-rata sampel dana perimbangan memiliki nilai yang rendah. Nilai rata-rata sebesar 1327,05371 lebih besar dari standar deviasi yaitu 361,05589, yang artinya data menyebar secara merata.

Variabel kontrol (X5) dalam penelitian ini adalah belanja rutin dengan nilai maksimum sebesar 3812,76 yang dicapai oleh Kota Semarang pada tahun 2022. Sedangkan nilai minimum sebesar 291,26 yang dicapai Kabupaten Batang pada tahun 2019. Nilai mean 1547,3015 lebih besar dari nilai median yaitu 1519,5416 artinya nilai mean terletak dibagian kanan kurva distribusi frekuensi, sehingga kurva

belanja rutin miring ke bagian kanan. Dengan demikian rata- rata sampel belanja rutin memiliki nilai yang tinggi. Nilai rata- rata sebesar 1547,3015 lebih besar dari standar deviasi yaitu 505,93402, yang artinya data menyebar secara merata.

4.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan uji yang harus dipenuhi pada analisis regresi linier berganda. Melalui uji- uji pada asumsi klasik akan menilai apakah model regresi linier Ordinary Least Square dapat digunakan pada penelitian. Terdapat 4 uji asumsi klasi yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi:

4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah residual data pada model regresi linier berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji kolmogorov simirnov. Data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi > 0.05 , begitu pun sebaliknya apabila nilai signifikansi < 0.05 maka distribusi residual data tidak normal. Berikut merupakan hasil uji normalitas dengan menggunakan kolmogorov-smirnov.

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		175
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,11704395
Most Extreme Differences	Absolute	,060
	Positive	,060
	Negative	-,037

Test Statistic	,060
Asymp. Sig. (2-tailed)	,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.	
b. Calculated from data.	
c. Lilliefors Significance Correction.	
d. This is a lower bound of the true significance.	

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 25

Berdasarkan tabel 4.2 hasil uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Test dengan total data sampel sebanyak 175 data, menunjukkan bahwa nilai signifikansi Kolmogorov-smirnov sebesar 0,200 lebih besar dari 0.05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

4.3.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui korelasi residual periode pengamatan dengan pengamatan sebelumnya, melalui deteksi *Durbin Watson*. Kriteria uji *Durbin Watson (DW)* adalah apabila angka DW berada di dU sampai dengan 4-dU maka dinyatakan bebas autokorelasi. Pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi disajikan pada tabel 4.3 berikut.

Tabel 4. 4 Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,520 ^a	,271	,249	,06202	1,840

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 25

Berdasarkan tabel 4.3 diperoleh hasil Durbin-Watson test sebesar 1,840. Dimana $1,840 > 1,8117$ (dU), serta $1,840 < 2,1883$ (4-dU). Sehingga, nilai DW sudah sesuai dengan ketentuan yakni nilai DW lebih besar daripada dU dan nilai DW lebih kecil daripada 4-du, atau sudah sesuai dengan konsep $dU < DW < 4-dU$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat atau bebas autokorelasi.

4.3.3 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas (independen). Regresi data panel yang baik adalah jika antar variabel bebas tidak terdapat korelasi. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas adalah dengan melihat *Centered Varians Inflation Factors* (VIF), apabila $VIF < 10$ dan nilai *tolerance* $> 0,1$ maka tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas. Adapun hasil pengujian multtikolinearitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pendapatan Asli Daerah	,119	8,395
	Belanja Modal	,373	2,684
	SPI	,822	1,217
	Dana Perimbangan	,238	4,194
	Belanja Rutin	,101	9,908
a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah			

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 25

Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan pada tabel 4.4 hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel penelitian pendapatan asli daerah, belanja modal, sistem pengendalian internal, dana perimbangan, dan belanja rutin mempunyai nilai tolerance lebih besar dari 0,1 serta nilai Varians Inflation Factors (VIF) yang lebih kecil dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi antar variabel, dengan demikian terbebas dari multikolinearitas.

4.3.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya kesamaan varians dari residual satu pengamatan dengan pengamatan lainnya dalam satu model regresi. Model regresi yang baik adalah tidak mengalami heteroskedastisitas. Apabila nilai probabilitas $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas, namun apabila nilai probabilitas $< 0,05$ maka terjadi heteroskedastisitas atau tidak lolos uji. Hasil pengujian heteroskedastisitas disajikan pada tabel 4.5.

Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		T	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	-95,369	97,043	-,983	,327
	Pendapatan Asli Daerah	34,587	21,626	1,599	,112
	Belanja Modal	3,361	4,235	,794	,429
	SPI	,030	,114	,263	,793
	Dana Perimbangan	236,648	119,782	1,976	,051
	Belanja Rutin	-135,322	94,300	-1,435	,153
	a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah				

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 25

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel independen yang terdiri dari pendapatan asli daerah, belanja modal, dan sistem pengendalian internal memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 5% atau 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari heteroskedastisitas. Sementara itu, variabel kontrol dana perimbangan dan belanja rutin memiliki nilai signifikansi lebih dari 0.05.

4.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Pada penelitian ini analisis hasil yang dipakai adalah regresi linier berganda. uji regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh tiga variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil dari regresi linier berganda disajikan pada tabel 4.6 dan 4.7.

Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi Linier Berganda sebelum Variabel Kontrol

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.	
	B	Std. Error			
1	(Constant)	,260	,010	26,752	,000
	Pendapatan Asli Daerah	6,520E-5	,000	2,948	,004
	Belanja Modal	-6,912E-5	,000	-3,486	,001
	SPI	,001	,001	1,295	,197

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 25

Tabel 4.8 Hasil Uji Regresi Linier Berganda sesudah Variabel Kontrol

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.	
	B	Std. Error			
1	(Constant)	1,092	,022	48,710	,000
	Pendapatan Asli Daerah	,000	,000	4,342	,000
	Belanja Modal	-9,761E-5	,000	-	,002
	SPI	,006	,002	3,510	,001
	Dana Perimbangan	,000	,000	4,897	,000
	Belanja Rutin	,000	,000	-	,000
				5,921	

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 25

Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.7 maka persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$KKPD = 1,092 + (0,000) X_1 - (9,761E-5) X_2 + (0,006) X_3 + (0,000) X_4 + (0,000) X_5 + \epsilon$$

Keterangan:

KKPD = kinerja keuangan pemerintah daerah

X_1 = pendapatan asli daerah (variabel independen)

X_2 = belanja modal (variabel independen)

X_3 = sistem pengendalian internal (variabel independen)

X_4 = dana perimbangan (variabel kontrol)

X_5 = belanja rutin (variabel kontrol)

e = koefisien error

Berdasarkan persamaan regresi diatas maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (constant) menunjukkan angka 1,092 dengan arah positif yang memiliki arti apabila variabel pendapatan asli daerah (X_1), belanja modal (X_2), sistem pengendalian internal (X_3), dana perimbangan (X_4) dan belanja rutin (X_5) dianggap konstan, maka besarnya variabel kinerja keuangan pemerintah daerah (Y) adalah sebesar 1,092.
2. Koefisien regresi variabel pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan angka 0,000 dengan arah positif dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ yang memiliki semakin besar Pendapatan Asli Daerah maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah
3. Koefisien regresi belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan angka $-9,761E-5$ dengan arah negatif dan nilai

signifikansi $0,002 < 0,05$ yang memiliki arti semakin besar belanja modal maka semakin menurun kinerja keuangan pemerintah daerah.

4. Koefisien regresi variabel Sistem Pengendalian Internal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan angka 0,006 dengan arah positif dan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ yang memiliki arti semakin baik Sistem Pengendalian Internal maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah.
5. Koefisien regresi variabel kontrol dana perimbangan menunjukkan angka 0,000 dengan arah positif dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ yang memiliki semakin besar dana perimbangan maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah.
6. Koefisien regresi variabel kontrol belanja rutin menunjukkan angka 0,000 dengan arah positif dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ yang memiliki semakin besar belanja rutin maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah.

4.5 Uji Kelayakan Model

4.5.1 Uji Statistik F (Signifikan Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel- variabel independent secara bersama- sama mempengaruhi variabel dependen. Hasil uji F pada penelitian ini disajikan pada tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4. 9 Hasil Uji F

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 25

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,231	5	,046	10,833	,000 ^b
	Residual	,721	169	,004		
	Total	,952	174			

Berdasarkan hasil uji F yang terdapat pada tabel 4.8 nilai F menunjukkan angka 10,833 dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independent yang meliputi pendapatan asli daerah, belanja modal dan sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen kinerja keuangan pemerintah daerah dengan dana perimbangan dan belanja rutin sebagai variabel kontrol.

4.5.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi yang kemudian dilambangkan oleh *Adjusted R²* digunakan untuk mengetahui seberapa mampu variabel dependen dijelaskan oleh variabel independennya. Semakin tinggi koefisien determinasi maka variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Berikut merupakan hasil pengujian koefisien determinasi:

Tabel 4. 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi sebelum Variabel Kontrol

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,384 ^a	,148	,131	,02526

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 25

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.9 dapat diketahui bahwa nilai *adjusted R square* sebesar 0,131 hal ini menunjukkan bahwa variabel dependen (kinerja keuangan pemerintah daerah) mampu dijelaskan oleh variabel independent (pendapatan asli daerah, sistem pengendalian internal, belanja modal) sebesar 0,131 atau 13,1% sedangkan sisanya yakni 86,9% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Tabel 4. 11 Hasil Uji Koefisien Determinasi setelah Variabel Kontrol

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,520 ^a	,271	,249	,06202

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 25

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.10 dengan menambahkan variabel kontrol dapat diketahui bahwa nilai *adjusted R square* mengalami kenaikan menjadi 0,249 hal ini menunjukkan bahwa variabel independent (pendapatan asli daerah, sistem pengendalian internal, belanja modal) dengan variabel kontrol (dana perimbangan dan belanja rutin) mampu menjelaskan variabel dependen (kinerja keuangan pemerintah daerah) sebesar 0,249 atau 24,9% sedangkan sisanya yakni 75,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

4.6 Pengujian Hipotesis

4.6.1 Uji Statistik (Uji t)

Pengujian hipotesis perlu dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Berikut merupakan hasil pengujian hipotesis:

Tabel 4.12 Hasil Uji t

Model		t	Sig.	Kesimpulan
1	Pendapatan Asli Daerah	4,342	,000	H ₁ : + signifikan (Hipotesis diterima)
	Belanja Modal	-3,203	,002	H ₂ : + signifikan (Hipotesis ditolak)
	SPI	3,510	,001	H ₃ : + signifikan (Hipotesis diterima)
	Dana Perimbangan	4,897	,000	
	Belanja Rutin	-5,921	,000	

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 25

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.11 menyajikan kekuatan hubungan masing- masing variabel independent terhadap variabel dependen yang dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Variabel pendapatan asli daerah (X1) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,000 memiliki arah positif dengan t hitung sebesar 4,342 dan nilai sig sebesar $0,000 < 0,05$ yang artinya nilai signifikansi lebih kecil dari 5% atau 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H1 diterima,

maknanya pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Variabel belanja modal (X2) memiliki nilai koefisien regresi sebesar $-9,761E-5$ memiliki arah negatif dengan t hitung sebesar $-3,203$ dan nilai sig sebesar $0,002 < 0,05$ yang artinya nilai signifikansi lebih kecil dari 5% atau 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H2 yang menyatakan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah ditolak.

3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Variabel sistem pengendalian internal (X3) memiliki nilai koefisien regresi sebesar $0,006$ memiliki arah positif dengan t hitung sebesar $3,510$ dan nilai sig sebesar $0,001 < 0,05$ yang artinya nilai signifikansi lebih kecil dari 5% atau 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, artinya sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

4.7 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal, dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota se- Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2022, maka berikut merupakan pembahasan daripada hasil penelitian:

4.7.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial yang telah diuraikan pada tabel 4.11 bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dengan demikian hipotesis (H_1) diterima. Pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang cukup signifikan pada kinerja keuangan pemerintah daerah, semakin tinggi daerah dalam memperoleh pendapatan asli daerah maka hal tersebut menunjukkan bahwa semakin meningkat kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari potensi- potensi daerah sebagai wujud dari desentralisasi daerah (Istiza et al., 2021). Kemandirian suatu daerah dapat terlihat dari kemampuan suatu daerah dalam menaikkan Pendapatan Asli Daerah (Digdowiseiso et al., 2022). Berdasarkan hasil penelitian, pada tahun 2018-2022 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah mampu menggali potensi- potensi daerahnya melalui pemanfaatan berbagai sumber pendapatan di daerah. Kontribusi pendapatan asli daerah yang tinggi menunjukkan adanya pengelolaan keuangan daerah yang baik, sehingga hal tersebut menunjukkan kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lathifa dan Haryanto, 2019), (Maulina et al., 2021), (Fernandes dan Putri, 2022) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Adanya kontribusi yang besar pada pendapatan asli daerah maka berdampak pula pada meningkatnya penerimaan daerah yang menunjukkan daerah mampu membiayai daerahnya tanpa menunggu pendanaan dari pusat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu

mengelola keuangan daerah dengan baik untuk tujuan kesejahteraan rakyat dan pembangunan daerah.

4.7.2 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis kedua menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan SPSS 25 belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, yang berarti hipotesis kedua ditolak. Sehingga menunjukkan semakin tinggi belanja modal justru menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah (Maulina et al., 2021).

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah yang bersumber dari APBD untuk kegiatan investasi pemerintah daerah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung maupun tidak langsung (Lathifa dan Haryanto, 2023). Hipotesis kedua menyatakan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja modal yang dikeluarkan untuk pembiayaan infrastruktur daerah dan investasi daerah dapat menunjang produktivitas daerah yang berdampak pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, berdasarkan hasil penelitian belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan. Faktor yang pertama adalah mungkin hal tersebut disebabkan oleh realisasi belanja operasional kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 terutama pada bagian belanja pegawai dan barang

yang lebih dominan daripada belanja modal. Penambahan dana untuk dialokasikan pada belanja modal dapat melalui penekanan pada belanja pegawai, sehingga dana yang dialokasikan dapat dimaksimalkan untuk pengadaan infrastruktur untuk investasi daerah yang berimplikasikan pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah. Faktor kedua adalah pengalokasian belanja modal tidak digunakan untuk aset produktif (Maulina et al., 2021). Pengalokasian belanja modal untuk aset produktif penting dilakukan karena hal tersebut dapat memicu optimalisasi potensi daerah terutama pada area pendapatan yang dapat menunjang kinerja keuangan pemerintah. Faktor lain adalah pengadaan infrastruktur oleh pemerintah tidak cukup memotivasi masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan daerah, sehingga hal tersebut belum mampu mendongkrak pendapatan suatu daerah secara signifikan (Fernandes dan Putri, 2022).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Antari dan Sedana, 2018), (Nauw dan Riharjo, 2021), (Maulina et al., 2021), (Fernandes dan Putri, 2022) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah merupakan investasi daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut (Antari dan Sedana, 2018) keberhasilan kegiatan belanja modal juga dapat dilihat dari segi mutu yakni apakah realisasi belanja sesuai dengan yang dihasilkan, kesesuaian pelaksanaan belanja modal dengan waktu yang telah ditetapkan, realisasi belanja modal berorientasi pada kepentingan publik yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.7.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dengan demikian hipotesis ketiga diterima. Sistem pengendalian internal memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin kuat sistem pengendalian internal pada pemerintahan hal tersebut membuktikan semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menyatakan bahwa sistem pengendalian pemerintah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seluruh penyelenggara pemerintahan dengan terus menerus secara efektif, handal, dan taat kepada peraturan perundang-undangan untuk menciptakan kepercayaan. Sistem pengendalian internal merupakan alat untuk mengontrol kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerahnya agar tidak keluar dari jalur semestinya yang dapat memicu penyimpangan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu oleh (Karim dan Mursalim, 2019), (Mattoasi et al., 2021), dan (Seniorita et al., 2022) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah mampu secara optimal menerapkan sistem pengendalian internal di tiap daerahnya. Sistem pengendalian internal yang mampu diterapkan

secara maksimal menunjukkan bahwa pemerintah mampu mengelola keuangan, sumber daya daerah, pengamanan aset dengan baik untuk mencegah terjadinya fraud. Kuatnya sistem pengendalian internal pada pemerintahan mengindikasikan kinerja keuangan pemerintah yang baik, karena dalam kinerjanya terdapat suatu alat kontrol yang membatasi pemerintah untuk tidak melakukan suatu hal diluar batas.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan dengan menggunakan alat statistik SPSS versi 25 dan analisis hasil yang telah dijabarkan pada bab 4, maka diperoleh kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah yang dihitung menggunakan total pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang dihitung menggunakan rasio efektivitas. Adanya pengaruh positif menunjukkan bahwa apabila Pendapatan Asli Daerah meningkat maka akan diikuti dengan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Belanja modal yang dihitung dengan menggunakan total belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang dihitung menggunakan rasio efektivitas. Pengaruh negatif antara belanja modal terhadap kinerja keuangan berarti apabila belanja modal mengalami peningkatan maka kinerja keuangan akan mengalami penurunan.
3. Sistem Pengendalian Internal yang dihitung menggunakan jumlah temuan SPI memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang dihitung menggunakan rasio efektivitas. Adanya pengaruh positif antara Sistem Pengendalian Internal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa apabila Sistem

Pengendalian Internal mengalami kenaikan maka kinerja keuangan pemerintah daerah juga akan meningkat.

5.2 Keterbatasan

1. Obyek penelitian ini hanya terbatas pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018-2022. Oleh sebab itu hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan pada obyek di luar penelitian ini karena memiliki karakteristik yang berbeda.
2. Pada hasil uji koefisien determinasi dengan menggunakan variable control menunjukkan bahwa nilai uji sebesar 0,249 atau 24.9% yang merupakan peningkatan sebesar 11,8% dari hasil uji sebelum menggunakan variabel control. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh Pendapatan Asli Daerah, belanja modal dan Sistem Pengendalian Internal terhadap kinerja keuangan sebesar 24.9%. sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan dengan melihat faktor Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal, dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang dapat memberikan pengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya memberikan perhatian lebih pada pengalokasian

belanja modal untuk pengadaan infrastruktur guna meningkatkan produktivitas daerah yang berdampak pada peningkatan efektivitas kinerja keuangan.

2. Bagi peneliti berikutnya disarankan untuk mengembangkan ruang lingkup penelitian dengan menambah lebih banyak variabel lain serta berbagai aspek lain seperti non keuangan contohnya akuntabilitas, tata kelola yang baik, kompetensi aparatur karena kinerja keuangan pemerintah daerah juga terkait dengan kebijakan dan manusia yang menjalankannya sehingga dapat memberikan manfaat bagi ilmu ekonomi dan akuntansi sektor publik.



DAFTAR PUSTAKA

- Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(2), 1080.
<https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v7.i02.p19>
- (Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Tengah, 2023)
- Bappeda Jateng. (2020, Juli 16). *Gegara Covid-19 PAD Jateng Turun Rp.1,9 Triliun*. Dipetik, 20 Agustus 2023, dari Bappeda Jateng: <https://bappeda.jatengprov.go.id/gegara-covid-19-pad-jateng-turun-rp-19-trilyun/>
- Bilqis, H. N., & Priyono, N. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2015-2020. *Jurnal Economina*, 2(2),
<https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.340>
- Biro Pusat Statistik. (2018). *Statistik Jawa Tengah Tahun 2016-2018*. Semarang.
- Biro Pusat Statistik. (2022). *Statistik Indonesia*. Jakarta.
- Biro Pusat Statistik. (2021). *Statistik Jawa Tengah Tahun 2019-2021*. Semarang.
- Digdowiseiso, K., Subiyanto, B., & Reza., D. C. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(6).
- DJPK Kemenkeu. (2023). *Postur APBD Nasional*. Dipetik, 25 Juli 2023, dari DJPK Kemenkeu: <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>
- Dwigantara, M. P., & Handayani, N. (2021). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Intervening *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA)*. Surabaya.
- Fauziah, I. N., & Ekaningtias, D. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Belanja, Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Legislatif, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal of Public and Business Accounting*, 3(1), 29-61
- Fernandes, J., & Putri, S. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada 19 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(1), 198–209.
<https://doi.org/10.46306/rev.v3i1.102>
- Hafandi, Y., & Romandhon, R. (2020). Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten

Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 182–191. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1337>

Hailuddin, Nourmalita, U., & Wijimulawiani, B. S. (2022). Belanja Modal dan Tingkat Inflasi serta Dampaknya pada Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010-2019. *Journal of Economics and Business*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.29303/ekonobis.v8i1.89>

Hidayat, T., Putri, A. M., & Murialti, N. (2021). Pengaruh Good Governance, Kompetensi, Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kampar. *Jurnal Akuntansi*, (Vol. 1, Issue 1). www.goriau.com,

Huda, S., & Sumiati, A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 14(1), 85–100. <https://doi.org/10.21009/wahana.14.016>

Indonesia, P. R. (2019). *Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Indonesia, P. R. (2014). *Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah*.

Indonesia, P. R. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Indonesia, P. R. (2008). *Undang- Undang Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah*.

Istiza, D., Anis, F., & Yulitiawati. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Etap*, (Vol. 2, Issue 1), 2(1).

Karim, R. A., & Mursalim, M. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Keuangan. *Paradoks : Jurnal Ilmu Ekonomi* (Vol. 2, Issue 1). <https://doi.org/10.33096/paradoks.v2i1.105>

Kireina, N. Y., & Octaviani, A. (2021). Analisis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab Semarang Periode Tahun 2016-2019. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 32–37. <http://e-journal.stie-aub.ac.id>

Lathifa, H., & Haryanto (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 8(2). <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>

Latifah, I. A., & Amalia, D. (2022). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan

Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Kinerja Keuangan. *National Multidisciplinary Sciences*, 1(5), 735–743.
<https://doi.org/10.32528/nms.v1i5.227>

- Lestari, E., & Dini, W. H. (2020). Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2013-2018). *E- Proceeding Of Management*, (Vol. 7, Issue 2).
- Marlianita, Y., & Saleh, S. A. (2020). Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi , Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah , dan Rasio Tingkat Pembiayaan SiLPA terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 25–35.
<https://jurnal-akuntansi.polban.ac.id/>
- Mattoasi, M., Musue, D. P., & Rauf, Y. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jambura Accounting Review*, 2(2), 100–109. <https://doi.org/10.37905/jar.v2i2.34>
- Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, N. S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 5(2), 390.
<https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i2.373>
- Mulyaningsih, P., & Nasehati, S. N. (2022). Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*. 2022. Issue Period, 6(3), 612–622. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v6i3.819>
- Nauw, T.E., & Ikhsan, B. R. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(2), 390. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i2.373>
- Niswani, N., Ikhyanuddin, I., Firdaus, R., & Nurhasanah, N. (2022). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2020. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 1(1), 65.
<https://doi.org/10.29103/jam.v1i1.6367>
- Oktarina, E. N. (2019). Analisis Faktor- Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang, Skripsi. Universitas Muhammadiyah, Palembang.
- Pradana, A., Sunardi, S., & Fahmi, M. (2022). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Provinsi Sumatera Bagian Selatan).

Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 10(2), 119.
<https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.6802>

- Ramadhan, R. P. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 81.
<https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.2455>
- Sari, N. M. D. P., & Mustanda, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(8), 4759.
<https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i08.p02>
- Seniorita, Modding, B., Andi, N. N., & Dani, I. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur Dan Sistem Pengendalian Internal. *Jurnal Sosio Sains*, (Vol. 8, Issue 1). <http://journal.ildikti9.id/sosiosains>
- Sudarmana, I. P. A., & Sudiarta, G. M. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(4), 1338.
<https://doi.org/10.24843/ejmunud.2020.v09.i04.p06>
- Sudarmanto, E., & Utami, C. K. (2021). Pencegahan Fraud Dengan Pengendalian Internal Dalam Perspektif Alquran. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 195.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1593>
- Syamsuddin, I., Muhammad, P. N., & Karim, A. (2022). Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018-2020. *YUME : Journal of Management*, 5(2), 170–177.
<https://doi.org/10.25668/yum.v5i2.1557>
- Tjandrakirana, R., Ermadiani, E., Rohman, A., & Widad, A. (2019). Pengaruh Laporan Hasil Pemeriksaan, Ketidakpatuhan Pada Peraturan, Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Dan Tindak Lanjut Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Selatan. *Jurnal Profita*, 12(2), 186.
<https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.02.002>
- Warsito, J. A., & Arza, F. I. (2023). Pengaruh Penerapan Konsep Value for Money dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Akuntabilitas Publik di Kota Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 5(2), 666–674.
- Saragih, F., & Iilda, A. S. (2020). Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tebing. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM)*, 1, 73.
<http://jom.unpak.ac.id/index.php/akuntansi/article/viewFile/574/528>